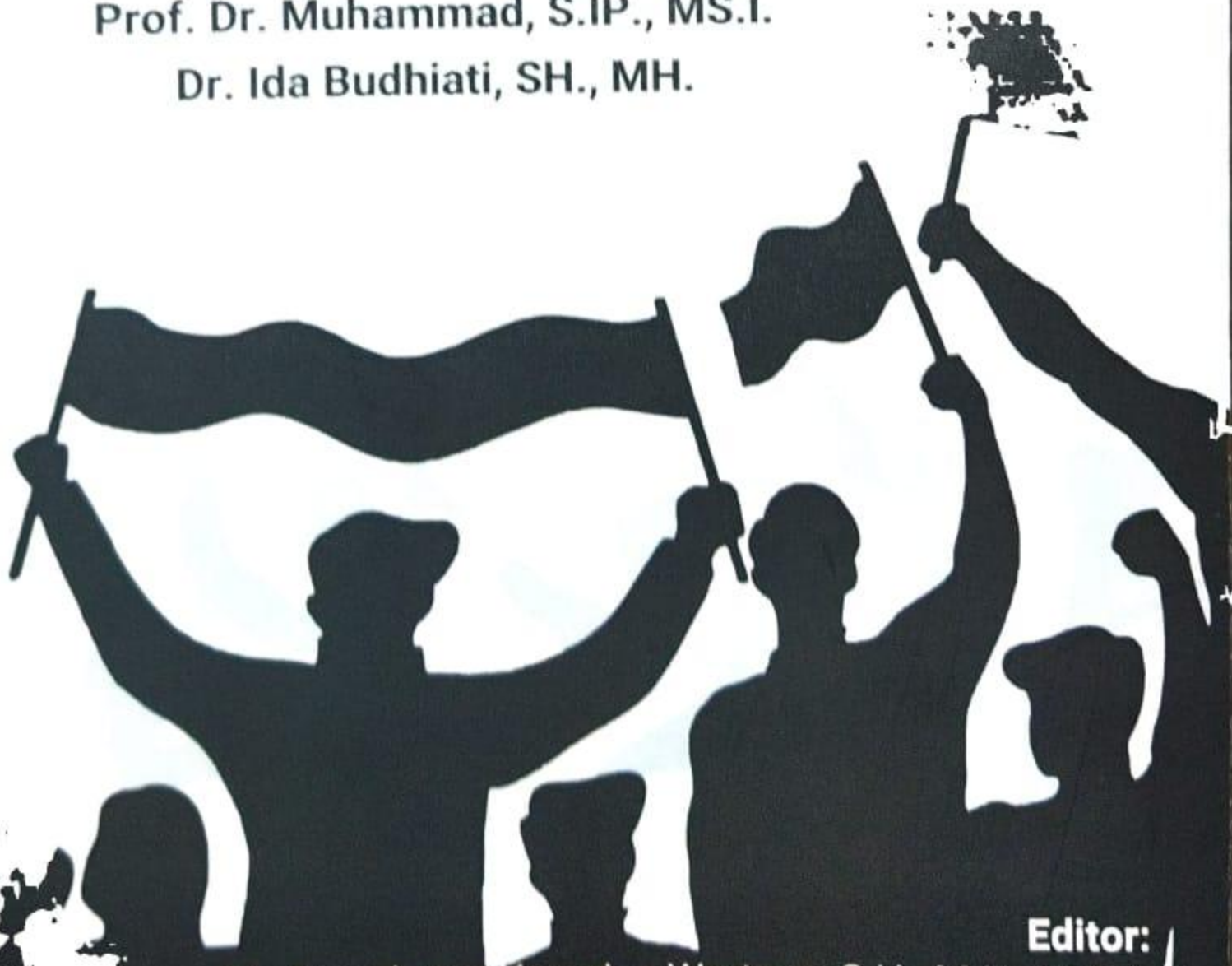


# FILSAFAT PEMILU BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si  
Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MS.I.  
Dr. Ida Budhiati, SH., MH.



Editor:  
Dr. Franciscus Xaverius Wartoyo, S.H., M.H., M.Pd.

---

## **FILSAFAT PEMILU**

### **BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT**

x + 387 hlm.; 14 x 20 cm

---

**ISBN: 978-623-316-623-2**

**e-ISBN: 978-623-316-621-8 (PDF)**

**Penulis** : Teguh Prasetyo, Muhammad & Ida Budhiati  
**Editor** : Franciscus Xaverius Wartoyo  
**Tata Letak** : Nur Huda A.  
**Desain Sampul** : Nur Huda A.

**Cetakan 1** : November 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris mau pun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

---

### **Isi di luar tanggung jawab percetakan**

---

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

### BAB I

#### GAMBARAN MENGENAI FILSAFAT HUKUM PEMILU BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT .....

A. Soal-Soal Pokok dalam Filsafat Pemilu .....	1
B. Sifat dan Karakteristik Sistem dalam Filsafat Pemilu .....	1

### BAB II

#### FILSAFAT PEMILU BERMARTABAT .....

A. Premis, Postulat dan Latar Belakang Filsafat Pemilu .....	2
B. Substansi dan Tatanan Filsafat Pemilu Bermartabat.....	3
C. Filsafat Pemilu Bermartabat dan Konsep-Konsep Dasar .....	3
D. Asas, Prinsip dan Tujuan dalam Pemilu Bermartabat.....	5

### BAB III

#### DIMENSI FILSAFAT PEMILU DALAM PENDEKATAN SEJARAH (*Suatu Epistimologi Yuridis*) .....

A. Asas-Asas Hukum dalam Sejarah Pemilu di Indonesia .....	5
B. Prinsip Pemilu di Cuplikan Lintasan Sejarah Pemilu .....	5
1. Asas-Asas Kepemiluan dalam UU No. 7 Tahun 1953 .....	5
2. Prinsip Pemilu dalam UU No. 15 Tahun 1969 .....	6
3. Asas Penyelenggara Pemilu UU No. 4 Tahun 1975 .....	7
4. Asas Penyelenggara Pemilu UU No. 2 Tahun 1980 .....	8
5. Asas Penyelenggara Pemilu PP No. 35 Tahun 1985 .....	9
6. Asas Penyelenggara Pemilu PP No. 10 Tahun 1995 .....	10
7. Asas Penyelenggara Pemilu UU No. 3 Tahun 1999 .....	11

## **BAB IV**

### **GAMBARAN TENTANG PENYELENGGARA**

<b>PEMILU: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)</b> .....	<b>137</b>
A. KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Bermartabat .....	138
B. Keanggotaan, Tugas, Wewenang, Kewajiban: KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.....	144
C. Peraturan dan Keputusan KPU .....	150
D. Kesekretariatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	151
E. KPU Provinsi .....	153
F. KPU Kabupaten/Kota.....	157
1. Syarat Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota .....	161
2. Pengangkatan Anggota KPU.....	163
3. Pengangkatan Anggota KPU Provinsi.....	165
4. Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota .....	168
5. Pemberhentian Keanggotaan KPU .....	171
6. Mekanisme Pengambilan Keputusan.....	174
7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan oleh KPU .....	176
G. Panitia dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum di Dalam dan Luar Negeri .....	177
1. Panitia Pemilihan Kecamatan.....	179
2. Panitia Pemungutan Suara.....	181
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .....	184
4. Panitia Pemilihan Luar Negeri .....	186
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri .....	187
6. Persyaratan Keanggotaan PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN .....	189
7. Pemberhentian Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN .....	190

## **BAB V**

### **MENGENAI BAWASLU SEBAGAI PENGAWAS**

<b>PEMILU BERMARTABAT.....</b>	<b>192</b>
A. Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum .....	192
1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) .....	192
2. Bawaslu Provinsi, Tugas, Kewenangan dan Kewajibannya .....	192
3. Bawaslu Kabupaten/Kota, Tugas, Kewenangan dan Kewajibannya .....	203
4. Pengawasan Pemilu di Tingkat Kecamatan.....	207
5. Pengawasan Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desa .....	210
6. Pengawasan Pemilu di Luar Negeri .....	211
7. Pengawasan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara .....	214
B. Persyaratan Sumpah dan Janji bagi Pengawas Pemilu .....	215
C. Kesekretariatan Pengawasan Pemilu .....	218
D. Pengangkatan Bawaslu.....	220
1. Pengangkatan Anggota Bawaslu .....	220
2. Pengangkatan Bawaslu Provinsi .....	222
3. Pengangkatan Bawaslu Kabupaten/Kota.....	225
4. Pengangkatan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS .....	227
E. Pemberhentian dalam Kelembagaan Pengawas Pemilu.....	227
F. Pertanggungjawaban Pengawas Pemilu .....	230

## **BAB VI**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP RI) SEBAGAI PERADILAN ETIK**

<b>PENYELENGGARA PEMILU BERMARTABAT.....</b>	<b>23</b>
A. Kedudukan, dan Keanggotaan DKPP RI.....	23
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP RI .....	24
C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu .....	24
1. Terminologi dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 .....	25

2. Tujuan, Landasan dan Prinsip bagi Penyelenggara Pemilu .....	253
3. Hukum Materiil <i>Ethic</i> Perilaku Penyelenggara Pemilu .....	258
D. Hukum Formil Penegakan <i>Ethic</i> Penyelenggara Pemilu .....	265
1. Peristilahan Hukum Formil Etik Penyelenggara Pemilu .....	270
2. Prinsip dan Ruang Lingkup (Yurisdiksi) Persidangan .....	273
3. Pengaduan, Laporan dan Rekomendasi .....	273
4. Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan.....	278
5. Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu .....	282
6. Perihal Tim Pemeriksa Daerah (TPD).....	286
7. Penetapan Putusan DKPP.....	288

## **BAB VII**

<b>PENGATURAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILU BERMARTABAT.....</b>	<b>293</b>
A. Pengaturan Hak Memilih.....	293
B. Penyusunan Daftar Pemilih & Data Kependudukan .....	294
C. Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden.....	299
D. Mekanisme Pencalonan Anggota DPD .....	304
E. Mekanisme Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota .....	307
F. Selintas Mengenai Kampanye Pemilu .....	309
G. Pemungutan Suara, Penghitungan, Rekapitulasi dan Pemungutan Suara Ulang .....	311
1. Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara .....	311
2. Soal Penghitungan Suara dalam Pemilu .....	312
3. Pemungutan, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi.....	313

H. Penetapan Hasil, Pemilu Lanjutan dan Pemantauan Serta Pendanaan Pemilu .....	3
1. Aspek dalam Penetapan Hasil Pemilu .....	3
2. Pemantauan dan Pemantau Pemilu .....	3
3. Partisipasi Masyarakat dan Pendanaan dalam Penyelenggaraan Pemilu .....	3

## **BAB VIII**

### **NORMA PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU, PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU.....**

A. Mengenai Hakikat Pelanggaran Pemilu.....	3
B. Sengketa Proses Pemilu .....	3
C. Perselisihan Hasil Pemilu .....	3
D. Tindak Pidana Pemilu dan Ancaman Pidana Pemilu .....	3

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**PROFIL PENULIS .....**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Brennan, Jason *The Ethics of Voting*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011.
- Dworkin, Ronal. *A Matter of Principle*, Clarendon Press, Oxford, 1986.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- Husein, Harun. (Ed.), *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Kedua, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990.
- Moh. Kusnardi & Harmaily brahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Morwood James (Ed.), *The Pocket Latin Dictionary*, Paperback Edition, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- Örücü, Esin. *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.
- Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya, 2015.
- Kameo. Jeferson & Teguh Prasetyo, *Pancasila as the Firs and Foremost Source of Laws: A Dignified Justice Philosophy*,



Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 24, Special Issue 1, 2021.

Pahlevi, Indra. *Sistem Pemilu di Indonesia, Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Cetakan Pertama, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.

Reynolds, Andrew dkk., Khoirunnisa Nur Agustyati (Ed.). Terjemahan Indonesia, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perludem, Jakarta, 2016.

Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Penyelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Pertamam Penerbit LP2SB, Jakarta Timur, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, 1983, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Cetakan Kedua, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan*

*Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan I, Nusamedia, Bandung, 2015.

\_\_\_\_\_, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2016.

\_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017;

\_\_\_\_\_, *Pancasila the Ultimate of All the Sources of Laws (A Dignified Justice Perspective)*, Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), Vol. 54, October 2016.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

\_\_\_\_\_, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

\_\_\_\_\_, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Beramrtabat*, Cetakan-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018;

Wade, H. W. R. *Administrative Law*, Fift Edition, Reprinted 1986, Oxford University Press, Oxford, 1986.

# FILSAFAT PEMILU BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Filsafat mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) atau filsafat pemilu dalam buku ini dimulai dari suatu pemahaman filsafat pada umumnya, namun pemahaman yang umum itu nyaris tidak dapat diperbandingkan dengan pemahaman dalam kerangka filsafat hukum. Hukum itu adalah filsafat, tidak dibalik. Pada umumnya filsafat hukum bertugas untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum berhasil dijawab melalui ilmu pengetahuan hukum. Selain itu dalam filsafat hukum dijawab soal-soal pelik yang digeluti dalam ilmu hukum. Filsafat Pemilu yang dikemukakan di dalam buku ini, sama seperti buku-buku filsafat Pemilu sebelumnya yang ditulis oleh penulis buku ini berpusat pada penyediaan berbagai macam jawaban yang mengakar atas soal-soal dalam Pemilu yang tersedia dalam Undang-Undang Pemilu yang hingga saat ini masih berlaku. Teori yang menjadi basis filsafat Pemilu demikian adalah apa yang disebut dengan *the Indonesian jurisprudence, legal science, filsafat hukum, legal philosophy* yang dirancang dan dibangun anak bangsa, yaitu penulis sendiri, dalam hal ini filsafat keadilan bermartabat (*the dignified justice philosophy*).

Suatu undang-undang yang menjadi tempat disediakannya berbagai macam jawaban yang *radix* atas persoalan mengenai Pemilu dapat berubah namun ditekankan dalam buku ini bahwa Filsafat Pemilu yang berada di balik eksistensi undang-undang Pemilu tidak mudah berubah. Filsafat Keadilan Bermartabat memegang postulat bahwa mana kala suatu undang-undang sebagai suatu manifestasi dari jiwa bangsa (*Volkgeist*) itu masih berlaku dan tidak diuji untuk dinyatakan tidak mengikat oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, maka sebagai manifestasi dari jiwa bangsa, dia—peraturan perundang-undangan itu—menjadi tempat ditemukannya jawaban-jawaban yang *radix* dan wajib diikuti dengan penuh kepatuhan (*obedience*) tentang Pemilu. Misalnya jawaban-jawaban tentang tujuan dari Pemilu, asas-asas, prinsip (*principles*) dan kaidah atau norma mendetail penyelenggaraan Pemilu, begitu pula kelembagaan yang menyelenggarakan Pemilu; kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing, soal-soal pendanaan kampanye, berbagai pengaturan tentang pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu, termasuk justifikasi atas dimiliki dan tidak dimilikinya hak individu rakyat pemilih untuk memberikan suara dalam suatu Pemilu dalam rangka membentuk suatu Pemerintah baru dan memilih wakil-wakil untuk mengawal jalannya Pemerintahan yang baru tersebut.

Penerbit K-Media  
Bantul, Yogyakarta  
kmediacorp  
kmedia.cv@gmail.com  
www.kmedia.co.id

e-ISBN 978-623-316-621-8

